



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN

MS I Tahun Sidang 2021-2022

(22 September – 08 Oktober 2021)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI II	5
A. FUNGSI LEGISLASI	5
B. FUNGSI ANGGARAN	6
C. FUNGSI PENGAWASAN	7
KOMISI III	10
A. FUNGSI LEGISLASI	10
B. FUNGSI ANGGARAN	14
C. FUNGSI PENGAWASAN	16
D. TUGAS KHUSUS	22
KOMISI IV	25
A. FUNGSI LEGISLASI	25
B. FUNGSI ANGGARAN	25
C. FUNGSI PENGAWASAN	25

KOMISI V	28
A. FUNGSI LEGISLASI	28
B. FUNGSI ANGGARAN	29
C. FUNGSI PENGAWASAN	29
KOMISI VI	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	30
C. FUNGSI PENGAWASAN	30
KOMISI VII	32
A. FUNGSI LEGISLASI	32
B. FUNGSI ANGGARAN	32
C. FUNGSI PENGAWASAN	35
KOMISI VIII	38
A. FUNGSI LEGISLASI	38
B. FUNGSI ANGGARAN	38
C. FUNGSI PENGAWASAN	38
KOMISI IX	40
A. FUNGSI LEGISLASI	40

B. FUNGSI ANGGARAN	40
C. FUNGSI PENGAWASAN	41
KOMISI X	49
A. FUNGSI LEGISLASI	49
B. FUNGSI ANGGARAN	50
C. FUNGSI PENGAWASAN	51
KOMISI XI	52
A. FUNGSI LEGISLASI	52
B. FUNGSI ANGGARAN	56
C. FUNGSI PENGAWASAN	60
BADAN LEGISLASI	61
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN	63
BADAN ANGGARAN	75
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	81
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	82
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	84
PANITIA KHUSUS	85

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Panja Diplomasi Luar Negeri	Penanggulangan Covid-19 Komisi I DPR RI.	Rapat Intern	
2	Kunjungann kerja di Provinsi NTB	Program pembangunan infrastruktur TIK dan Internet BAKTI di Provinsi NTB.	Kunjungann kerja Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk mengetahui program pembangunan infrastruktur TIK dan Internet BAKTI untuk meningkatkan Pendidikan dan pelayanan publik di Provinsi NTB.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3	Kunjungan Kerja di Bali	Infrastruktur penyiaran pendukung migrasi analog switch off (ASO) di Bali	Kunjungan kerja Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19 untuk mengetahui perkembangan penyediaan infrastruktur penyiaran pendukung migrasi analog switch off (ASO) di Bali.	
4	Kunjungan kerja reses ke Korem 131/Santiago Manado dan Binda Sulawesi Utara	---	Kunjungan kerja reses ke Korem 131/Santiago Manado dan Binda Sulawesi Utara untuk mengetahui dukungan Korem 131/Santiago dalam pelaksanaan vaksinasi di Sulut, kondisi kesejahteraan prajurit saat ini dan kebutuhan idealnya, ketersediaan, kebutuhan, dan perawatan Alutsista untuk menjaga kedaulatan NKRI, antisipasi perkembangan tantangan dan ancaman di wilayah Sulut serta mengetahui	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dukungan binda Sulut dalam pelaksanaan vaksinasi di Sulut, deteksi dini pergerakan kelompok radikal dan terorisme di Sulut, deteksi dini terhadap peredaran narkoba dan senjata illegal di Sulut, dan deteksi dini arus keluar masuk barang dan orang di perbatasan antara Sulut dengan Filipina Selatan.	
5	Kunjungan kerja reses ke Binda Sulawesi Selatan	---	Kunjungan kerja reses ke Binda Sulawesi Selatan untuk mengetahui deteksi dini dan analisis pergerakan kelompok radikal dan teroris serta pengganggu keamanan di Sulsel, deteksi dini dan analisis pengaruh kebijakan vaksin terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional tahun 2021, dan laporan kinerja Binda Tahun 2020	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dan 2021 serta hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tupoksi.	
6	Kunjungan kerja reses ke Kodam XVII/Cenderawasih dan Binda Papua	---	Kunjungan kerja reses ke Kodam XVII/Cenderawasih dan Binda Papua untuk mengetahui kesiapan Kodam XVII/Cenderawasih dalam menangkal ancaman separatism dan mendukung pengamanan dalam pelaksanaan PON XX tahun 2021 di Provinsi Papua, serta kesiapan Binda Papua dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman separatisme serta gangguan keamanan dalam pelaksanaan PON XX tahun 2021 di Provinsi Papua.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1	RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI SELATAN	Penyusunan	Keputusan Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2021, menjadi Usul Inisiatif DPR RI	
2	RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI UTARA	Penyusunan	Keputusan Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2021, menjadi Usul Inisiatif DPR RI	
3	RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGAH	Penyusunan	Keputusan Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2021, menjadi Usul Inisiatif DPR RI	
4	RUU TENTANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Penyusunan	Keputusan Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2021, menjadi Usul Inisiatif DPR RI	
5	RUU TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Penyusunan	Keputusan Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2021, menjadi Usul Inisiatif DPR RI	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
6	RUU TENTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Penyusunan	Keputusan Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2021, menjadi Usul Inisiatif DPR RI	
7	RUU TENTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Penyusunan	Keputusan Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2021, menjadi Usul Inisiatif DPR RI	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.		a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah		
2.		a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah		

Catatan:

- Sesuai dengan Surat Badan Anggaran Nomor AG/09356/DPR RI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan Nomor AG/09710/DPR RI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal : Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA.2020 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2022.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
1	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah 	<p>Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara:</p> <p>Peninjauan ke PT. Bibit Unggul Karo Biotek dan membahas masalah pertanahan di Kab. Karo</p>	
2	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Purwakarta b. Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung c. Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat d. Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Subang 	
3	Kunjungan Kerja Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
		c. Kebijakan pemerintah	Evaluasi Pelaksanaan Program e-KTP di Kota Bekasi. b. Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Evaluasi Pelaksanaan Program e-KTP di Kota Bogor. c. Kab. Tangerang Provinsi Banten Evaluasi Pelaksanaan Program e-KTP di Kabupaten Tangerang.	
4	Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Provinsi Sumatera Selatan Peninjauan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Program KTP-el, Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021, Pelaksanaan Program PTSL, dan permasalahan kasus-kasus pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
			<p>b. Provinsi Sulawesi Utara Peninjauan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Program KTP-el, Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021, Pelaksanaan Program PTSL, dan permasalahan kasus-kasus pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>c. Provinsi Bali Peninjauan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Program KTP-el, Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021, Pelaksanaan Program PTSL, dan permasalahan kasus-kasus pertanahan di Provinsi Bali.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

1. RUU TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (*SELANJUTNYA DISEBUT RUU TENTANG KEJAKSAAN*)

Pada tanggal 8 April 2021, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus **menyetujui** bahwa dalam rangka efisiensi/mempersingkat waktu proses pembahasan RUU dimaksud, apabila Surat Presiden RI mengenai Menteri yang ditugaskan untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tentang Kejaksaan telah diterima oleh DPR RI, maka **dapat langsung** ditugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk membahas RUU dimaksud **tanpa** penugasan Bamus kembali. Rapat Paripurna tanggal 9 April 2021 memutuskan bahwa **menyetujui** RUU tentang Kejaksaan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR dan akan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan pertengahan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 belum dikeluarkan Surat Presiden, sehingga Komisi III DPR RI belum dapat melaksanakan Pembahasan RUU tentang Kejaksaan didasarkan atas Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 April 2021.

2. RUU TENTANG PENYADAPAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Agustus 2021 dan berdasarkan Prolegnas Jangka Panjang 2019-2024, bahwa pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 Komisi III DPR RI akan menyusun RUU tentang Penyadapan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi III DPR RI telah mengundang Badan Keahlian DPR (BKD) guna mendengarkan Penjelasan Kepala BKD sebagai perumus RUU tentang Penyadapan pada tanggal 8 September 2021.

Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI menyampaikan beberapa hal :

- a. Pengaturan yang berbeda dalam pelaksanaan penyadapan di berbagai undang-undang. Ada perbedaan pengaturan mengenai mekanisme penyadapan dan jangka waktu pelaksanaan penyadapan, yang dilakukan oleh Penyidik Polri, BNN, KPK, dll
- b. Ada beberapa peraturan mengenai penyadapan di berbagai undang-undang.
- c. Penyadapan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu
- d. Penyadapan yang akan dilakukan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan terkait dengan penyadapan dalam UU ini, penetapan diajukan kepada Ketua MA
- e. Penyadapan untuk tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme tidak memerlukan penetapan ketua pengadilan negeri. Penyadapan dalam keadaan mendesak, seperti:
 - potensi terjadi bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius;
 - telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - telah terjadi permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi
- f. Hasil Penyadapan:
 - Hasil Penyadapan bersifat rahasia
 - Penggunaan hasil Penyadapan dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan kepentingan penegakan hukum. (Proporsional: penggunaan informasi sesuai dengan lingkup tindak pidana yang dijadikan dasar permintaan untuk melakukan Penyadapan)
 - Penyimpanan hasil penyadapan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang melalui penetapan pengadilan
 - Aparat Penegak Hukum harus memusnahkan hasil Penyadapan yang tidak berkaitan dan tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum paling lambat 30 hari terhitung sejak selesai masa penyimpanan hasil Penyadapan.

Dalam Rapat tersebut Komisi III DPR RI memberikan catatan kepada Badan Keahlian agar dapat memperbaiki Naskah Akademik dan draf RUU atas masukan Anggota Komisi III DPR RI sebagai berikut:

- a. Perlu penegasan atas lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan untuk menghindari terjadinya *misuse*;
- b. Terkait dengan tahapan penyadapan, perlu diperjelas lagi tahapannya seperti apa karena penyadapan harus dalam proses upaya memaksa dan pasti akan ada HAM yang dilanggar untuk kepentingan penegakan hukum;
- c. Dalam UU agar menunjuk suatu badan atau lembaga yang akan bertugas atau berwenang untuk mengawasi atau melakukan *audit* kinerja dari lembaga hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan;
- d. Terkait dengan durasi penyimpanan hasil penyadapan, mohon dijelaskan siapa yang memberi perintah untuk penghapusan data hasil penyadapan tersebut selama maksimal 2 (dua) tahun. Selain itu, durasi 2 (dua) tahun terlalu cepat untuk dilakukan penghapusan data hasil penyadapan karena beberapa kasus berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, kemungkinan 5 (lima) tahun;
- e. Perlu diperjelas tujuan penyadapan dalam UU, dalam konteks apa, jenis tindak pidana apa yang dapat dilakukan penyadapan, dan kapan penyadapan dapat dilakukan;
- f. Lebih mempertajam rumusan RUU terkait penyadapan;
- g. saat melakukan penyusunan RUU terkait penyadapan ini, diawali dengan politik hukumnya terlebih dahulu, kemudian menyepakati *standing point* dan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan;
- h. Perlu disebutkan batasan yang ketat untuk melakukan Penyadapan;
- i. Terkait pemusnahan data hasil penyadapan, jangka waktu 2 (tahun) sudah tepat, dengan catatan tambahan jika ada kebutuhan penegakan hukum lanjutan terhadap hasil penyadapan tersebut maka jangka waktunya dapat

diperpanjang. Penambahan jangka waktu penyimpanan hasil penyadapan untuk kepentingan pengembangan juga perlu ditentukan kembali dan saat kasus selesai hasil penyadapan bisa dimusnahkan.

Untuk mendapatkan masukan yang berkaitan dengan substansi RUU tentang Penyadapan, Komisi III DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Amerika Serikat pada tanggal 2 sd 8 November 2021.

3. RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*), SELANJUTNYA DISEBUT RUU TENTANG *MLA IN CRIMINAL MATTERS*

Berdasarkan surat Presiden Nomor B-27/Pres/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 dan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 Juli 2021, menyetujui pembahasan terhadap RUU tentang *MLA in Criminal Matters* diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR RI melalui surat Pimpinan DPR RI Nomor LG/10366/DPR RI/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 mengundang Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Luar Negeri RI membahas RUU tentang *MLA in Criminal Matters* pada tanggal 23 Agustus 2021. Menkumham RI membalas surat undangan dengan Nomor M.HH.PR.05.01-29 tanggal 20 Agustus 2021 meminta penundaan Rapat Kerja.

Komisi III DPR RI akan mengundang kembali Menkumham dan Menlu dengan Nomor Surat LG/01.01/10785/DPR RI/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, untuk melaksanakan Rapat Kerja pada tanggal 01 September 2021 dengan Agenda penjelasan Pemerintah atas RUU tentang *MLA in Criminal Matters*, Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Penyerahan dan pembahasan DIM, rencana kerja, Pembentukan Panja, dan lain-lain.

Pada tanggal 02 sd 03 September 2021 Panja membahas DIM dan menyusun Laporan Panja, kemudian tanggal 06 September 2021 diadakan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham RI dan Menlu RI dengan agenda Laporan

Panja, pendapat akhir mini fraksi, penandatanganan RUU, dan pengambilan Keputusan. Dalam Raker tersebut diputuskan bahwa menyetujui RUU tentang *MLA in Criminal Matters* dan akan dibawa dalam Pengambilan Keputusan Tk. II dalam Rapat Paripurna terdekat guna mendapatkan persetujuan RUU tentang *MLA in Criminal Matters* sebagai Undang-Undang.

4. RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Agustus 2021 dan dituangkan kedalam surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/11469/DPR RI/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan untuk melakukan Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata. Dalam Surat Presiden Nomor R-35/Pres/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021, menugaskan Menteri Hukum dan HAM RI untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 14 Sptember 2021 bahwa Komisi III DPR RI akan membahas RUU tentang Hukum Acara Perdata pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

Sesuai Siklus pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2020 dan sesuai dengan siklus pembahasan RUU tentang APBN TA 2022 dari Badan Anggaran serta Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Agustus 2021 bahwa Komisi III DPR RI tidak lagi melaksanakan rapat fungsi anggaran dikarenakan sudah memutuskan anggaran mitra kerja beserta tambahannya. Dalam hal ini Komisi III DPR RI mengirim surat kepada Mitra Kerja untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2020, HAPSEM BPK Semester I dan II TA 2020, dan Penyempurnaan RKA K/L TA 2022, setelah itu Komisi III DPR RI mengirimkannya kepada Badan Anggaran.

Berdasarkan surat Pimpinan Komisi III DPR RI yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor 482-DW/KOM.III/MP.I/IX/2021 07 September 2021, hal: Persetujuan RKA K/L TA.2022, bahwa Komisi III DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja dan dilanjutkan dengan Rapat Intern, keputusannya menyetujui seluruh usulan RKA K/L dan RKP K/L Tahun Anggaran 2022 beserta usulan tambahan Mitra Kerja Komisi III DPR RI, yaitu:

Sesuai Nota Keuangan RAPBN Tahun 2022 terdapat beberapa mitra kerja Komisi III DPR RI mengalami penyesuaian (penambahan anggaran), sebagai berikut :

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2022 (Rp)	TAMBAHAN ANGGARAN (Rp.)	T O T A L
1.	Mahkamah Agung RI	11.570.133.400.000	250.000.000	11.570.383.400.000
2.	Kejaksaan Republik Indonesia	6.863.965.844.000	3.225.000.000.000	10.088.965.844.000
3.	Kementerian Hukum & HAM RI	17.021.652.627.000	441.876.767.000	17.463.529.394.000
4.	Kepolisian Negara RI	97.524.024.397.000	13.500.000.000.000	111.024.024.397.000
5.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1.601.184.890.000	200.000.000.000	1.801.184.890.000
6.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	1.093.222.899.000	250.000.000.000	1.343.222.899.000

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
1.	RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI, tanggal 27 September 2021.	<i>Membahas:</i> 1. Fungsi Legislasi di Komisi III 2. Penanganan kasus kebakaran Lapas & tenggelamnya KMP Pengayoman	1. Berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Nomor LG/12625/DPR RI/IX/2021 tanggal 16 September 2021 Hal: Undangan Rapat Kerja, Raker Komisi III dengan Menkumham RI akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021. 2. Berdasarkan Surat Menkumham Nomor SEK-PR.05.01-76 tanggal 27 September 2021 hal: Undangan Rapat Kerja Komisi III DPR RI, dikarenakan pada waktu yang bersamaan Menkumham akan melaksanakan Rapat Internal bersama Presiden di Istana Merdeka.	Raker Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI dijadwalkan kembali pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.
2.	RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA	<i>Membahas:</i> 1. Sinergitas koordinasi dengan aparat penegak	<i>Kesimpulan:</i> 1. <i>Komisi III DPR RI mendukung</i>	➤ Rapat dilaksanakan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
	<p>PPATK, tanggal 29 September 2021.</p>	<p>hukum/sinergitas lintas sectoral. 2. Peningkatan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus-kasus kejahatan ekonomi serta kendalanya.</p>	<p><i>optimalisasi Rencana Kerja PPATK Tahun 2022 khususnya dalam meningkatkan kualitas program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan proliferasi pendanaan senjata pemusnah massal, meningkatkan integritas sistem keuangan dan perekonomian nasional.</i></p> <p>2. <i>Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh institusi penegak hukum guna meningkatkan pemanfaatan hasil analisis dan hasil pemeriksaan untuk efektivitas penegakan</i></p>	<p>secara fisik dan virtual.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat dipimpin oleh Bp H. Ahmad Sahroni, SE, M.I.Kom. ➤ Dihadiri oleh Kepala PPATK beserta jajaran.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
			<p><i>hukum dan pemulihan aset negara; serta menyampaikan matriks Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang telah, sedang, dan belum ditindaklanjuti oleh institusi penegak hukum dengan memperhatikan aturan kerahasiaan sehingga dapat menjadi bahan pengawasan Komisi III terhadap institusi penegak hukum.</i></p> <p><i>3. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh panitia seleksi Calon Pimpinan Lembaga atau Pejabat Publik dalam menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh PPATK.</i></p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
			<p>4. <i>Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk melakukan Penilaian Risiko Nasional di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diseluruh sektor serta memperluas cakupan pemeriksaan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan di ruang virtual sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK yang diatur dalam Undang-Undang.</i></p>	
3.	<p>RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KETUA KOMNAS HAM RI, tanggal 4 Oktober 2021.</p>	<p><i>Membahas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja prioritas dan target yang akan dicapai. 2. Evaluasi kinerja dan komitmen penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berta masa lalu serta perkembangan penyelesaiannya. 	<p><u>Kesimpulan:</u></p> <p>1. <i>Komisi III DPR RI mendukung optimalisasi Rencana Kerja Komnas HAM Tahun 2022 khususnya dalam meningkatkan kualitas program pemajuan dan penegakan HAM,</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual. ➤ Rapat dipimpin oleh Bp Herman Herry (Ketua Komisi III DPR RI).

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
		3. Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menarik perhatian publik	<p><i>meningkatkan kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM.</i></p> <p>2. <i>Komisi III DPR RI meminta Komnas HAM untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh institusi penegak hukum guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian kasus HAM dalam mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah untuk mendukung penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.</i></p> <p>3. <i>Komisi III DPR RI mendukung dan akan memperjuangkan tambahan anggaran</i></p>	➤ Dihadiri oleh Ketua Komnas HAM RI beserta jajaran

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
			<p><i>untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan di APBN perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat menjalankan tugas dan fungsinya.</i></p>	
4.	<p>KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI</p>	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI tanggal 30 September s.d. 2 Oktober 2021, ke :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi DI Yogyakarta 2. Provinsi Sumbar <p>Pertemuan dengan Kapolda, dalam rangka mencari masukan terkait dengan Pengawasan Penegakan Hukum Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.</p>	<p>Perlu adanya sinergitas antara aparat penegak hukum, khususnya Polri dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta pelaksanaan PPKM Level 1 hingga Level 4 di seluruh wilayah Indonesia dan juga menyangkut arah dan kebijakan Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, sebagai wujud komitmen Polri dalam mengawal program pemulihan ekonomi nasional oleh Pemerintah, institusi Polri membentuk Satuan Tugas Pemulihan</p>	<p>➤ Pimpinan Tim:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi DI Yogyakarta, dipimpin oleh Bp H. Ahmad Sahroni, SE, M.I.Kom; b. Provinsi Sumatera Barat, dipimpin oleh Bp. Pangeran Khairul <p>➤ Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
			Ekonomi Nasional (Satgas PEN).	
5.	KUNJUNGAN KERJA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022	Pertemuan dengan: 1. Kapolda; 2. Kajati; 3. Kakanwil Kemenkumham; 4. Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi TUN, dan Kepala Pengadilan Tinggi Militer; 5. Kepala BNN Provinsi.	Berdasarkan Keputusan Rapat Intern tanggal 18 Agustus 2021, Komisi III DPR RI akan melaksanakan Kunker Reses MP I TS 2021-2022 ke 3 provinsi, yaitu: 1. Provinsi Jawa Timur, tgl 8 sd 12 Okt 2021. 2. Provinsi Maluku, tgl 8 sd 12 Okt 2021. 3. Provinsi NTT, tgl 13 sd 17 Okt 2021.	➤ Pimpinan Tim: a. Provinsi Jawa Timur , dipimpin oleh Bp Adies; b. Provinsi Maluku , dipimpin oleh Bp. Pangeran; dan c. Provinsi NTT , dipimpin oleh Bp. Herman Herry. ➤ Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.

D. TUGAS KHUSUS

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 13 September 2021, Komisi III DPR RI mendapat penugasan untuk membahas Calon Hakim Agung Tahun 2021. Atas dasar itu maka Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Intern pada tanggal 14 September 2021 guna membahas mekanisme pembahasan Calon Hakim Agung tersebut.

Dalam Rapat Intern diputuskan bahwa pada tanggal 17 September 2021 akan dilaksanakan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah oleh 11 Calon Hakim Agung, kemudian diteruskan pertemuan dengan Komisi Yudisial selaku penyelenggara rekrutmen Calon Hakim Agung Tahun 2021. Informasi publik atau publikasi ke 3 media massa dan media sosial, yaitu Kompas, Media Indonesia, Republika dan Detik.com pada tanggal 18 sd 19 September 2021. Pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 orang Calon Hakim Agung Tahun 2021 pada tanggal 20 September 2021, yaitu atas nama:

1. CALON HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.	Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
2.	Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
3.	Suharto, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung RI
4.	Aviantara, S.H., M.Hum.	Inspektur Wilayah I Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
5.	Jupriyadi, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
6.	Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung
7.	Suradi, S.H., S.Sos., M.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
8.	Yohanes Priyana, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang

2. CALON HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.	Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung
2.	Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten

3. CALON HAKIM AGUNG KAMAR MILITER

No.	Nama	Jabatan
1.	Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.	Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama

Pada tanggal 21 September 2021 Rapat Intern Komisi III DPR RI dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi atas Persetujuan Nama Calon Hakim Agung Tahun 2021. Adapun nama Calon Hakim Tahun 2021 yang disetujui oleh Komisi III DPR RI, yaitu:

1. H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. , sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
4. Suharto, S.H., M.Hum. , sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
5. Yohanes Priyana, S.H., M.H. , sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
6. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata; dan
7. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Militer.

Pimpinan Komisi III DPR RI melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna tanggal 21 September 2021, dan Rapat Paripurna memutuskan bahwa DPR RI menyetujui 7 orang Calon Hakim Agung Tahun 2021, yaitu:

1. H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. , sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
4. Suharto, S.H., M.Hum. , sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
5. Yohanes Priyana, S.H., M.H. , sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana;
6. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata; dan
7. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Calon Hakim Agung Kamar Militer.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Konser-vasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rapat Internal Panja RUU	Pembahasan rencana kegiatan penyusunan draf final RUU di internal Panja.	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	FGD Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan	Pendalaman Raker terkait RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2022	Hasil Keputusan Rapat Kerja 23 September 2021

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pertanian PT Pupuk Indonesia <i> Holding Company </i> beserta anak perusahaan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara;	a. Tata kelola dan penyaluran pupuk bersubsidi;	Kegiatan berupa FGD tanggal 4 Oktober 2021 yang ditindak-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan pemerintah	b. Perkembangan pelaksanaan kebijakan kartu tani; c. Melakukan pendalaman mengenai komposisi pupuk bersubsidi; d. Melakukan pembahasan mengenai E-RDCK; dan e. Membahas efektivitas kinerja penyuluh dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.	lanjuti dengan Rapat Intern Panja Pupuk tanggal 5 Oktober 2021
2.	DPRD Provinsi Jawa Tengah	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Masukan terkait kebijakan pupuk bersubsidi dan pelaksanaan kebijakan kartu tani	
3.	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Provinsi Jawa Barat: a. Peninjauan dan Diskusi di KM 0 Sungai Citarum, Kerta Sari Kabupaten Bandung mengenai program Citarum Harum. b. Peninjauan dan diskusi di Lokasi Budi Daya Ikan Mas Majalaya, di Desa	

MS I Tahun Sidang 2021-2022
(22 September 2021 – 08 Oktober 2021)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pakutandang Kecamatan Ciparay c. Peninjauan Budi Daya Tanaman Hortikultura di Pesantren Al Ittifaq, Ciwideuy.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan atas UU No. 38 tahun 2004	Panja RUU Perubahan atas UU No. 38 tahun 2004 mengadakan Rapat dengan Pemerintah (28/09/2021) untuk membahas DIM RUU	<p>Beberapa kesimpulan dan poin penting yang diputuskan antara lain:</p> <p>a. Panja telah selesai membahas semua DIM batang tubuh RUU (Namun, masih terdapat DIM dengan status pending) dan Panja sepakat DIM Penjelasan akan disesuaikan dengan batang tubuh. Untuk perumusan lebih lanjut terkait Penjelasan RUU diserahkan ke Tim Perumus.</p> <p>b. Pemerintah meminta waktu untuk melakukan konsolidasi internal antar Kementerian terkait DIM-DIM yang masih pending, dan rapat Panja akan dilanjutkan kembali pada Masa Persidangan berikutnya.</p>	
2.	RUU Badan Usaha Milik Desa	Pimpinan Komisi V, Pimpinan Komisi II, Pimpinan Komisi VI, Pimpinan Komisi XI dan Pimpinan Baleg	Salah satu keputusan dalam pertemuan tersebut adalah RUU tentang Badan Usaha Milik Desa diserahkan kepada Badan Legislasi untuk melakukan konsultasi dengan	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		diundang Pimpinan Dewan untuk membicarakan terkait RUU Badan Usaha Milik Desa, (5/10/21).	Pemerintah bersama DPD selaku pengusul RUU.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Sekjen Kemen PUPR, Sekjen Kemenhub, dan Sekjen Kemendes PDTT	Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (29/09/2021) untuk membahas sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, masukan, serta saran Komisi V DPR RI dalam RKA/K-L RAPN Tahun 2022.	Salah satu keputusan dalam RDP adalah agar Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa, PDTT dapat menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan masing-masing Kementerian paling lambat 14 hari kerja setelah UU tentang APBN ditetapkan dalam Rapat Paripurna.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

**LAPORAN DWI MINGGUAN
 KOMISI VI**

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
1.	Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II, Kementerian BUMN RI dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Pembahasan <i>Right Issue</i>	<p>Waskita merupakan BUMN yang berjasa dalam pembangunan tol trans Jawa sehingga mengalami kondisi perusahaan pertumbuhan hutang yang tinggi.</p> <p>Proses asset recycling memiliki peranan penting dalam mengurangi hutang Waskita Karya dan akan mengurangi ~Rp 41 Tn hutang konsolidasi</p>	<p>Komisi VI menyetujui rencana right issue sebagai tindak lanjut dari rapat kerja dengan Menteri BUMN RI Tanggal 22 September 2021 terkait persetujuan usulan tambahan PMN untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk., sebesar Rp.7.900.000.000.000,- (Tujuh Triliun Sembilan Ratus Miliar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Komisi VI DPR RI meminta PT Waskita Karya (Persero) Tbk., untuk melakukan monitoring dan perbaikan pengelolaan pasca restrukturisasi secara</p>

MS I Tahun Sidang 2021-2022
(22 September 2021 – 08 Oktober 2021)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KET
				optimal dan kepada Waskita Induk dan anak perusahaannya sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan baik

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU MIGAS	Rapat Intern		

Catatan:

- Rapat Intern Komisi VII DPR RI dengan Kepala BKD akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021 ditunda menjadi tanggal 13 September dengan agenda Presentasi Draft RUU Migas

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Eselon I Kementerian Perindustrian (Sekjen, Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Irjen, Dirjen Industri Agro dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Elektronika	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<p>Eselon I Kementerian Perindustrian (Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka; Dirjen Ketahanan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional; Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta Kepala BPSDM Industri)</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah</p>	<p>a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022</p>	
3.	<p>Eselon I Kementerian ESDM (Sekjen, Irjen, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Kepala BPH Migas, dan BPMA)</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah</p>	<p>a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022</p>	
4.	<p>Eselon I Kementerian ESDM (Dirjen Minerba, Kepala Badan Geologi, Kepala BPSDM, Kepala Balitbang ESDM, dan Sekjen DEN)</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah</p>	<p>a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Kepala BRIN, Kepala BAPETEN, dan Kepala BIG	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022 c. Penetapan RKA-K/L TA. 2022	
6.	Eselon I Kementerian ESDM (Sekjen, Irjen, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirjen Minerba, Badan Geologi, Kepala Kepala BPSDM, Kepala Balitbang ESDM, Kepala BPH Migas, BPMA, dan Sekjen DEN)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Melanjutkan a. Program Pelaksanaan Kegiatan TA. 2021 b. Pembahasan detail RKA-K/L TA. 2022	
7.	Menteri Perindustrian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Penetapan RKA-K/L TA. 2022	
8	Menteri ESDM	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	1. Penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RAPBN TA. 2022 2. Penetapan RKA-K/L TA 2022	

Catatan:

- Sesuai dengan Surat Badan Anggaran Nomor AG/09356/DPR RI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 dan Nomor AG/09710/DPR RI/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal : Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA.2020 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2022

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Dirjen Migas Kementerian ESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Pembahasan mengenai gas bertingkat berdasarkan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2016	
2.	a. Eselon I Kementerian ESDM b. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan negara dalam 3 tahun terakhir b. sumber-sumber penerimaan negara sektor ESDM c. Profil penerimaan negara dalam 5 tahun terakhir	
3.	Kepala dan Anggota Komite BPH Migas	a. Pelaksanaan undang-undang;	a. Program strategis BPH Migas 2021-2025	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	b. Progres, Kendala, dan solusi percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa	
4.	Sekjen dan Dirjen Migas Kementerian ESDM	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Penjelasan terkait Permen ESDM No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada kegiatan Usaha Hilir Migas	
5.	Duta Besar Denmark	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	Courtesy Call 1. Penjelasan INDODEPP 2. Update RUU EBT 3. Kemungkinan kerja sama Komisi VII DPR RI dengan Kedutaan Denmark untuk Energi Bersih	
6.	Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil dan Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	1. Kepastian pasokan alat Kesehatan dan obat-obatan dalam rangka penanganan Covid-19	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Perkembangan Industri Petrokimia 3. Nilai output Industri Kecil dan Menengah terhadap Industri Nasional 4. Kebijakan Pemerintah terhadap Ketahanan Industri pada masa pandemic Covid-19 5. Lain-lain 	
7	Kunjungan Kerja Spesifik	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Banten (Peninjauan ke PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. di Cilegon) 2. Provinsi Jawa Barat (Peninjauan ke PT Len Industri di Bandung) 3. Provinsi Bali (Peninjauan Kebon Raya Eka Karya LIPI di Bedugul) 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.	RUU Penanggulangan Bencana	a. Pembahasan	Pembahasan mengenai nomenklatur kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana	Rapat dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2021

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Evaluasi program dan anggaran tahun 2021	Memastikan program dan anggaran Sekjen dan Eselon I Kementerian Agama RI dapat berjalan sesuai target dan sasaran dengan serapan anggaran yang optimal.	Rapat dilaksanakan tanggal 27 September 2021	
2	Evaluasi program dan anggaran tahun 2021	Memastikan program dan anggaran di Sestama dan Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat berjalan	Rapat dilaksanakan tanggal 28 September 2021	

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		sesuai target dan sasaran dengan serapan anggaran yang optimal		
3.	Evaluasi program dan anggaran tahun 2021	Memastikan program dan anggaran di Sekmen dan Eselon I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berjalan sesuai target dan sasaran dengan serapan anggaran yang optimal.	Rapat dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2021	
4.	Kunsfik ke Lampung, Bandung dan Mojokerto	Pengawasan terhadap permasalahan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta kesiapsiagaan bencana.	Kunjungan dilaksanakan tanggal 30 September – 2 Oktober 2021	
5.	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan terhadap kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di madrasah, pesantren serta institusi pendidikan lainnya di lingkungan Kementerian Agama RI. b. Pengawasan terhadap penyaluran program bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial RI c. Pengawasan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi tupoksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 	Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 8-12 Oktober 2021	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kegiatan Panja 	<ul style="list-style-type: none"> Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan I TS 2021-2022

Catatan:

- Kegiatan harmonisasi, prolegnas, dan pemantauan/peninjauan hanya diisi oleh Badan Legislasi.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran	Tidak ada
2.	Badan Anggaran	a. Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga; b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.	Tidak ada

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Tanggal 27 September 2021, RDP serta RDPU dengan: 1. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes. 2. Dirjen Farmalkes Kemenkes 3. Kepala P2JK Kemenkes 4. Direktur Jampelkes BPJS Kesehatan 5. Kepala LKPP 6. GP Farmasi 7. IPMG 8. Gakeslab	1. Membahas tata kelola obat dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 2. Membahas kebijakan pengadaan obat dan alat kesehatan pada masa pandemi dan terobosan kebijakan untuk menjamin ketersediaan obat COVID-19 dan obat non-COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Review fornasi sedang dilakukan dengan target akan selesai bulan Oktober 2021 • LKPP telah bekerja semaksimal mungkin untuk menayangkan e-katalog obat dan alkes sesuai dengan usulan dari Kementerian Kesehatan • Asosiasi industri memberikan masukan agar kebijakan pengadaan obat dan alkes sesuai Perpres 12/2021 dapat menjamin ketersediaan obat covid-19 dan non-covid. • Akses obat inovatif juga dibahas khususnya untuk pasien kanker paru yang saat ini ada perbedaan pelayanan pengobatan di JKN. Salah satu kesimpulan rapat yaitu pemerintah memperluas pembiayaan inovatif sebagai salah satu solusi untuk memberikan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			akses pengobatan bagi pasien kanker EGFR negative.	
2.	<p>Tanggal 28 September 2021, RDP dan RDPU dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Ketua DJSN 2. Dewas BPJS Ketenagakerjaan 3. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus SPSI 4. Pengurus KSBSI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan penyerapan Penjelasan pengawasan klaim JHT, JP, JKP terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK dalam masa pandemi Covid-19; 2. Penjelasan pengawasan atas program-program BPJS Ketenagakerjaan dalam meringankan beban pekerja/buruh korban PHK dan dirumahkan pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ketenagakerjaan RI diminta untuk melakukan evaluasi dan review regulasi terkait besaran manfaat Jaminan Pensiun yang hanya sebesar Rp300.000 sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja. • Kementerian Ketenagakerjaan RI diminta untuk meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal serta mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial terutama regulasi antara program JHT dan JPK. • Sehubungan dengan sisa anggaran BSU tahun 2021 sebesar Rp1,791 T Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memanfaatkan sisa anggaran dengan memperluas kepesertaan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		masa pandemi Covid-19.	dan cakupan wilayah penerima bantuan secara nasional.	
3.	Tanggal 29 September 2021, RDP dengan Kepala BKKBN RI dan Dirjen Kesmas Kemenkes RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan tentang perkembangan kebijakan penanganan stunting. 2. Penjelasan tentang <i>grand design</i> BKKBN dalam percepatan penanganan stunting. 	<ul style="list-style-type: none"> • BKKBN RI sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting hendaknya proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), mekanisme dan tata kerja serta pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. • BKKBN RI dan Kementerian Kesehatan RI untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>terlibat dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 agar penanganan penurunan stunting di Indonesia dapat berhasil dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none">• Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat gabungan dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama RI, Kemeterian PUPR RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) RI, Kementerian Pertanian RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan agenda membahas koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021.	
4.	4 Oktober 2021, RDP dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan	Membahas tata kelola investasi BPJS Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai dengan tujuan prinsip-prinsip investasi sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. • BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil langkah yang mempertimbangkan kehati-hatian, keamanan dana dengan hasil investasi yang memadai dan menghindari penempatan investasi yang menimbulkan potensi kerugian. • BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk melakukan revisi Perdir/23/09/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan peningkatan investasi dan hasil pengembangan investasi secara maksimal. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Tanggal 5 Oktober 2021 RDPU/Audiensi dari Serikat Pekerja Jiwasraya, yg dilaksanakan.	Menyampaikan aspirasi	<p>Materi audiensi Serikat Pekerja Jiwasraya adalah meminta kepada Kementerian BUMN dan OJK kepada Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (persero) untuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT Asuransi Jiwasraya (persero) dengan Serikat Pekerja Jiwasraya Nomor 069.SJ.U.0720-014/SJP/07/2020 tanggal 27 Juli 2020; • Mempertimbangkan atau menunda migrasi pegawai ke pihak lain sampai dengan terpenuhinya seluruh hak-hal normatif dan syarat serta norma kerja yang berlaku bagi para pegawai; • menghentikan tindakan intimidatif dan Uniom Busting kepada pegawai dan pengurus Serikat Pekerja; dan • menerima perwakilan pegawai dalam Yayasan Kesejahteraan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sebagai surat SP Jiwasraya nomir 046/SPJ/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dengan perubahan Formula manfaat pegawai PT. Asuransi Jiwasraya (persero).</p> <p>Terhadap pengaduan ini, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi IX DPR RI akan mempelajari serta menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan Serikat Pekerja Jiwasraya dalam RDPU hari ini • Komisi IX DPR RI akan mendengarkan hasil telaahan dan tindak lanjut kasus pekerja PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Kementerian Ketenagakerjaan. • Komisi IX DPR RI akan mengadakan RDP dan RDPU dengan Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Kemenaker RI, Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dan Perwakilan Serikat Pekerja PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Raker dan RDP dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Koperasi & UKM, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan BPJS Ketenagakerjaan.	Penjelasan Program UMKM dan Ekonomi kreatif untuk pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK pada masa Pandemi Covid 19	Raker dan RDP tersebut tidak terlaksana sehubungan ketiadaan ijin dari Komisi VI dan Komisi X yang menjadi mitra kementerian tersebut.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<p>Rapat Intern Komisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pimpinan DPR RI tentang Penugasan untuk Membahas RUU tentang SKN. 2. Menyusun Program Kerja (Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Anggaran) Komisi X DPR RI MS I TS 2021-2022. 3. Rencana Kunker Spesifik, Kunker Panja Legislasi, Kunker Panja Pengawasan dan Kunker Reses Komisi X DPR RI pada MS I TS 2021-2022. 4. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI menjadwalkan rapat kerja dan rapat-rapat Panja RUU SKN dengan Kemenpora RI dan K/L lain sesuai surpres dan surat Pimpinan DPR untuk memulai pembahasan RUU SKN. 2. Komisi X DPR RI melanjutkan pendalaman terhadap substansi RUU tentang Praktik Psikologi dengan pemangku kepentingan bidang psikologi. 	<p>Surpres No.R-29/Pres/06/2021 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 2005 tentang SKN.</p> <p>Surat No.PW/09442/DPR RI/VII/2021 perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang SKN</p>
2.	<p>Konsinyasi Panja RUU SKN membahas isu-isu krusial (27 s.d 29 Spetember 2021 dilanjutkan 5 s.d 6 Oktober 2021)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Lingkup Olahraga 2. Olahraga Berbasis Teknologi (E-Sport) 3. Big Data Olahraga 4. Industri Olahraga 	<p>Isu-isu krusial belum selesai dibahas</p>

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		5. Olahragawan Sebagai Profesi 6. Jaminan Sosial 7. Penghargaan Olahraga 8. Suporter 9. Sumbangan Badan Usaha/Csr 10. Anggaran Olahraga Dari Pemerintah Langsung Ke Cabor 11. Lembaga Penyelesaian Sengketa Keolahragaan 12. Kelembagaan Anti Doping Nasional 13. Pendanaan Olahraga 14. KOI Dan KOI	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemenpora RI	Rapat kerja 21 September 2021 membahas RKA K/L TA 2022 sesuai hasil Banggar	Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Definitif Kemenpora RI TA 2022 sebesar Rp1.948.783.392.000.	
2.	Kemenparekraf/Ba parekraf RI	Rapat kerja 23 September 2021 membahas RKA K/L TA 2022 sesuai hasil Banggar	Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Definitif Kemenparekraf/Baparekraf RI TA 2022 sebesar Rp3.792.417.902.000.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kemendikbudristek RI	Rapat kerja 23 September 2021 membahas RKA K/L TA 2022 sesuai hasil Banggar	Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Definitif Kemendikbudristek RI pada RAPBN TA 2022 sebesar Rp72.994.908.331.000.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Provinsi DIY, Provinsi Sumut, Kota Surakarta	Kunjungan kerja spesifik bidang perpustakaan ke Provinsi DIY, Provinsi Sumut, Kota Surakarta merupakan daerah yang telah melaksanakan layanan perpustakaan digital. (24 s.d 26 September 2021)	Kunjungan dilaksanakan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan dari layanan perpustakaan digital.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Panja RUU KUP Komisi XI dengan Tim Panja RUU KUP Wakil Pemerintah	Membahas DIM RUU tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	Materi terlampir	Rapat tanggal 21,22,23,27,28, dan 29 September 2021
2.	Rapat Kerja dengan: 1. Menteri Keuangan RI 2. Menteri Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ketua Rapat 2. Laporan Panitia Kerja (Panja) 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi 4. Pembacaan Naskah RUU 5. Pengambilan Keputusan 6. Penandatanganan Naskah RUU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Komisi menyampaikan pengantar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI. 2. Ketua Panja melaporkan kepada Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah disepakati judulnya menjadi RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 3. Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini mengenai RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapat Akhir Mini Fraksi PDIP dibacakan oleh Bapak Andreas Eddy Susetyo dan Fraksi PDIP menyatakan setuju RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI). b. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Bapak Mukhamad Misbakhun dan Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI). c. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra dibacakan oleh Bapak Heri Gunawan dan Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI). d. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem dibacakan oleh Bapak 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Fauzi Amro dan Fraksi Partai Nasdem menyatakan setuju RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).</p> <p>e. Pendapat Akhir Mini Fraksi PKB dibacakan oleh Ibu Ela Siti Nuryamah dan Fraksi PKB menyatakan setuju RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).</p> <p>f. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Ibu Vera Febyanthy dan Fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).</p> <p>g. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dibacakan oleh Bapak Ecky Awal Mucharam dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak hasil pembahasan RUU tentang</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI.</p> <p>h. Pendapat Akhir Mini Fraksi Amanat Nasional dibacakan oleh Bapak Ahmad Najib Qodratullah dan Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan setuju RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).</p> <p>i. Pendapat Akhir Mini Fraksi PPP dibacakan oleh Ibu Wartiah dan Fraksi PPP menyatakan setuju RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR).</p> <p>4. Ketua Komisi membacakan draft Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</p> <p>5. Berdasarkan hasil Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Harmonisasi Peraturan</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Perpajakan untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II (Rapat Paripurna DPR RI).</p> <p>6. Naskah Batang Tubuh dan Penjelasan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM RI, dan perwakilan masing-masing Fraksi kecuali Fraksi PKS.</p>	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI	Pembahasan RKA Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun 2022 – Penyesuaian Hasil Banggar	<p>Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan RI menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan atas Rencana Kerja dan Penyesuaian Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022. 2. Komisi XI DPR RI menyetujui penyesuaian hasil Badan Anggaran DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.012.857.968.000,00 (Empat Puluh Empat Triliun Dua Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh 	Rapat tanggal 22 September 2021

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT				KETERANGAN
			<p>Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : (<i>Dalam milyar Rupiah</i>)</p>				
			NO	FUNGSI/ PROGRAM	PAGU ANGGARA N	DUKUNGA N ANGGARA N	PAGU ANGGARA N STELAH PENYESU AIAN BANGGAR
			01.Fungsi Pelayanan Umum		39.416	993	40.409
				Program Dukungan Manajemen	36.485	993	37.478
				Program Pengelolaan Belanja Negara	17		17
				Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.699		2.699.
				Program Kebijakan Fiskal	36		36
				Program Pengelolaan Perbendahar aan, Kekayaan Negara dan Risiko	178		178
			04.Fungsi Ekonomi		189		189
				Program Pengelolaan Penerimaan negara	1.		1
				Program Dukungan Manajemen	188		188

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT				KETERANGAN																		
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1240 272 1487 320">10.Fungsi Pendidikan</td> <td data-bbox="1487 272 1621 320">3.414</td> <td data-bbox="1621 272 1756 320"></td> <td data-bbox="1756 272 1883 320">3.414</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 320 1319 395">Program Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1487 320 1621 395">3.414.</td> <td data-bbox="1621 320 1756 395"></td> <td data-bbox="1756 320 1883 395">3.414.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 395 1487 448">Total Pagu Anggaran</td> <td data-bbox="1487 395 1621 448">43.020.</td> <td data-bbox="1621 395 1756 448">993</td> <td data-bbox="1756 395 1883 448">44.013</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p data-bbox="1240 491 1883 1129">Berdasarkan sumber dana, Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:</p> <ol data-bbox="1240 643 1883 1129" style="list-style-type: none"> 1) Rupiah Murni sebesar Rp34.617.811.762.000,00 2) PNBPN sebesar Rp7.086.197.000,00 3) HLN sebesar Rp22.250.509.000,00 4) BLU sebesar Rp9.365.709.500.000,00 <p>3. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.</p>				10.Fungsi Pendidikan	3.414		3.414			Program Dukungan Manajemen	3.414.		3.414.			Total Pagu Anggaran	43.020.	993	44.013			
10.Fungsi Pendidikan	3.414		3.414																						
Program Dukungan Manajemen	3.414.		3.414.																						
Total Pagu Anggaran	43.020.	993	44.013																						
2.	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik	Pembahasan RKA Kementerian Keuangan dalam RAPBN Tahun 2022 – Penyesuaian Hasil Banggar	<p>Komisi XI DPR RI dan Badan Pusat Statistik menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan atas Rencana Kerja dan Penyesuaian Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022. 				Rapat tanggal 1 Oktober 2021																		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																
			<p>2. Komisi XI DPR RI menyetujui penyesuaian hasil Badan Anggaran DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.691.816.660.000 (Lima Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: right;">(Dalam Rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1234 722 1883 1126"> <thead> <tr> <th data-bbox="1234 722 1424 834">PROGRAM</th> <th data-bbox="1424 722 1610 834">PAGU ANGGARAN 2022</th> <th data-bbox="1610 722 1740 834">ANGGARAN TAMBAHAN</th> <th data-bbox="1740 722 1883 834">PERUBAHAN ANGGARAN 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1234 834 1424 898">Dukungan Manajemen</td> <td data-bbox="1424 834 1610 898">3.059.882</td> <td data-bbox="1610 834 1740 898">0</td> <td data-bbox="1740 834 1883 898">3.059.882</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 898 1424 1058">Penyediaan dan Pelayanan Informasi (PPIS)</td> <td data-bbox="1424 898 1610 1058">1.631.935</td> <td data-bbox="1610 898 1740 1058">1.000.000</td> <td data-bbox="1740 898 1883 1058">2.631.935</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1234 1058 1424 1126">TOTAL PAGU</td> <td data-bbox="1424 1058 1610 1126">4.691.817</td> <td data-bbox="1610 1058 1740 1126">1.000.000</td> <td data-bbox="1740 1058 1883 1126">5.691.817</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1234 1126 1883 1385">Berdasarkan sumber dana, Alokasi Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1234 1318 1883 1385">1. Rupiah Murni sebesar Rp5.665.607,95 juta 	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2022	ANGGARAN TAMBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN 2022	Dukungan Manajemen	3.059.882	0	3.059.882	Penyediaan dan Pelayanan Informasi (PPIS)	1.631.935	1.000.000	2.631.935	TOTAL PAGU	4.691.817	1.000.000	5.691.817	
PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2022	ANGGARAN TAMBAHAN	PERUBAHAN ANGGARAN 2022																	
Dukungan Manajemen	3.059.882	0	3.059.882																	
Penyediaan dan Pelayanan Informasi (PPIS)	1.631.935	1.000.000	2.631.935																	
TOTAL PAGU	4.691.817	1.000.000	5.691.817																	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. PNBPN sebesar Rp26.208,72 juta 3. Badan Pusat Statistik akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

No	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	Badan Legislasi	1. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Harmonisasi 4 (empat) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, dan RUU tentang Sulawesi Tenggara. (tgl 21 September 2021)
		2. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka 3 (tiga) RUU tentang Provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu: RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur. (tgl 21 September 2021)
		3. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Laporan Panja atas Hasil Harmonisasi 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. (tgl 23 September 2021)
		4. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. (tgl 23 September 2021)
		5. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penjelasan Tim Ahli terkait penyempurnaan draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran. (tgl 23 September 2021)

No	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		6. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyempurnaan penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. (tgl 27 September 2021)
		7. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan hasil penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. (tgl 29 September 2021)

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	BKSAP – KSR	<p>23 September 2021 – Sidang Executive Committee SEAPAC</p> <p>Dr. Fadli Zon, S.S., M.Si @fadlizon , Ketua BKSAP selaku President of South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), didampingi Dr. Mardani Ali Sera @mardanialisera , Wakil Ketua BKSAP selaku Secretary of SEAPAC, memimpin Sidang Executive Committee pada Kamis (23/9/2021) di Bogor.</p> <p>Sidang Excom SEAPAC ini membahas keanggotaan baru di GOPAC, amandemen konstitusional SEAPAC, Rencana Aksi SEAPAC dan kegiatan SEAPAC kedepannya.</p> <p>SEAPAC Excom saat ini beranggotakan 10 (sepuluh) Anggota Parlemen dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Timor Leste.</p> <p>Hasil Sidang ini dapat diakses dari website https://ksap.dpr.go.id/seapac</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
2.	BKSAP - KSR	<p>23 September 2021 – SEAPAC WEBINAR “Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti – Bribery Legislations (UK and Southeast Asia)”</p> <p>Dr. Mardani Ali Sera @mardanialisera Wakil Ketua BKSAP yang juga Secretary of South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) memoderatori Webinar on Enforcing Measures to Combat Bribery: Comparative Analysis on the Anti-Bribery Legislations (UK and Southeast Asia) yang digelar pada Kamis (23/9/2021) di Bogor.</p> <p>Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Si @fadlizon, selaku Presiden SEAPAC, menyampaikan sambutannya bahwa upaya memerangi suap merupakan kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan tata pemerintahan yang baik agar dana publik dapat teralokasikan secara tepat sasaran.</p> <p>Webinar diikuti oleh anggota SEAPAC-GOPAC dan anggota parlemen lainnya di Asia Tenggara. Turut hadir berpartisipasi sebagai Delegasi Indonesia yaitu Effendy Sianipar (FPDIP), Irine Yusiana Roba Putri (FPDIP), Dyah Roro Esti (FPG), Ratih Megasari Singkarru (FP-Nasdem), Arzetti Bilbina (FPKB), Sakinah Al Jufri (FPKS), Primus Yustisio (FPAN), Ema Umiyattul Chusnah (FPPP).</p> <p>Sebagai ajang bertukar pandangan tentang isu korupsi, Webinar ini menghasilkan kesepahaman bahwa tidak ada pendekatan yang seragam dalam penanganan korupsi dan diperlukan political will yang kuat untuk memberantasnya karena korupsi bersifat dinamis.</p> <p>Suap telah menjadi induk kejahatan korupsi di Indonesia, namun Undang-undang tentang Tindak Pidana Suap jarang sekali digunakan. Diharapkan dapat dilakukan kodifikasi peraturan agar berbagai regulasi terkait anti-suap yang ada di Indonesia dapat menjadi satu instrumen khusus untuk memperjelas penanganan kasus suap dan korupsi.</p>
3.	BKSAP – KSB	<p>24 - 30 September 2021 Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Kolombia</p> <p>Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Kolombia dipimpin oleh Yan Permenas Mandenas (F.P. Gerindra) dengan anggota: Bambang Hermanto (F-PG), Rian Firmansyah (F.P.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Nasdem), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F.PKB), Tommy Kurniawan (F.PKB), Heru Wibowo (F.PKB) dan Nazaruddin Dek Gam (F.PAN)</p> <p>Dalam kunjungan tersebut, GKSB mengadakan beberapa pertemuan antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dubes RI di Bogota, Bp. Priyo Iswanto 2. Ketua Parlemen Kolombia (Camara de Representates) HE. Mrs. Jennifer Arias dan Ketua Friendship Group Kolombia - Indonesia Hon. Jose Daniel Lopes 3. Kementerian Luar Negeri (Mr. Hector Isidro Arenas Neira) 4. Direktur Intelejen (Mr. Jesus Eduardo Cruz Silva dan jajaran) 5. Direktur Anti Narkotika (Jendral Herman Semante dan jajaran) 6. Wakil Menteri Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Mrs. Maria Andrea Godoy Casadiego dan jajaran) 7. Wakil Menteri Transportasi (Mrs. Olga Lucia Ramirez dan jajaran) <p>Hasil Pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pertemuan dengan Dubes RI di Bogota, dibahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Kerjasama ekonomi kedua negara juga mengalami kenaikan walaupun di masa pandemi. <p>Pihak kolombia telah melakukan investasi di Indonesia dan diharapkan pengusaha Indonesia juga dapat berinvestasi di Kolombia, karena banyak peluang kerjasama yg bisa dilakukan oleh kedua negara. Sebagaimana arahan Kemlu bahwa Indonesia harus bisa membidik pasar non tradisional, dan harus bisa membuka pasar baru. Untuk itu, Kolombia bisa dijadikan sbg pintu masuk bagi kerjasama perdagangan dengan pasar di Amerika Latin.</p> <p>Adapun kendala yg sering dihadapi adalah karena jarak yg sangat jauh dan citra Kolombia yang bagi banyak masyarakat Indonesia masih dinilai negatif.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Dalam hubungan antar parlemen, disampaikan bahwa DPR Kolombia telah membentuk Grup Persahabatan dengan DPR RI sejak tahun 2018. Oleh karenanya pembentukan GKSB DPR RI - Kolombia pada tahun 2020 dan kunjungan GKSB ini ke Kolombia dipandang sebagai suatu langkah positif dalam merespons dan meningkatkan hubungan antar parlemen kedua negara. Kolombia termasuk dalam negara yang dapat melakukan penanganan terhadap Covid 19 dengan sangat baik. Angka positif penularan sudah menurun drastis dan sebagian besar warganya telah divaksin. Varian virus Mu yang beritanya begitu meluas dan menakutkan di Indonesia pada kenyataannya tidak seperti yg diberitakan di berbagai media.</p> <p>2. Dalam pertemuan dengan Presiden Parlemen Kolombia (Camara De Representates) H.E. Jennifer Arias beserta Ketua Friendship Group Kolombia - Indonesia Hon. Jose Daniel Lopes dibahas berbagai hal diantaranya:</p> <p>Pandemi Covid 19 yang melanda dunia saat ini tdk menghalangi komitmen kedua parlemen utk terus meningkatkan hubungan kerjasama. Selain itu, perlu juga ditingkatkan hubungan dalam hal perdagangan, pertanian, pariwisata ramah lingkungan, dan juga penanganan Covid 19. Kolombia menganggap Indonesia telah maju dlm penanganan Covid dan produksi vaksin, diharapkan bisa berdiskusi untuk saling berbagi pengalaman.</p> <p>Walaupun Indonesia dan Kolombia dibatasi dengan adanya jarak yg sangat jauh, namun hal itu diharapkan tidak menjadi kendala dgn adanya saling pengertian dan kesamaan minat kedua negara. Ketua GKSB menyampaikan bahwa dalam kunjungan ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dan dialog yang akan meningkatkan hubungan yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi. Termasuk dalam kerjasama parlemen di berbagai forum regional/internasional yg diikuti bersama seperti Inter-Parliamentary Union.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Dalam pertemuan ini juga Ketua GKSB mengundang Parlemen Kolombia utk dapat hadir dalam sidang IPU pada spring 2022 di Bali, Indonesia.</p> <p>3. Pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Kolombia, diterima oleh Hector Isidro Arenas Neira, Direktur Asia Afrika dan Oseania yg mewakili Wamenlu menerima kunjungan delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI - Parlemen Kolombia.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembebasan visa kunjungan dan travel corridor arrangement; - penguatan mekanisme kerjasama bilateral kedua negara; - economic recovery pasca pandemi - upaya peningkatan kerjasama perdagangan (ekspor impor); - peningkatan kerjasama dalam hal investasi, turisme, infrasturkur dan update perkembangan bbrp joint agreement kedua negara, antara lain dlm hal pemberantasan peredaran narkotika dan promosi industri kreatif; - dukungan kolombia kpd Indonesia sbg observer dlm pacific alliance; serta - kerjasama akademi diplomasi bagi diplomat Kolombia dan Indonesia. <p>4. Dalam pertemuan dengan Direktur Intelejen, dibawah Kepolisian Negara Kolombia dibahas berbagai hal terkait dengan intelejen antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa fungsi badan intelejen di Kolombia tidak hanya menangani kasus-kasus besar seperti operasi penangkapan bandar narkotika namun juga menangani kasus-kasus kecil di masyarakat, seperti pencurian atau perampokan. - Badan Intelejen Kolombia berada di bawah Kepolisian Negara Kolombia dan menjalankan fungsi intelejen dengan berbagai peralatan pendukung baik dari produksi sendiri maupun Kerjasama dengan negara lain

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam menjalankan tugasnya, setiap orang diberi pelatihan khusus terlebih dahulu sehingga memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaan tugasnya - Dalam setiap penangkapan/operasi intelejen, tetap dikedepankan penghargaan atas Hak Asasi Manusia. - Permasalahan besar yang kerap terjadi di Kolombia, selain kasus gembong narkoba adalah adanya kelompok separatis yang ingin melepaskan diri dari Kolombia. <p>5. Dalam Pertemuan dengan Direktur Anti Narkoba dibahas beberapa hal terkait penanganan Narkoba di Kolombia antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Anti Narkoba ini berada dibawah koordinasi Kepolisian Negara Kolombia - Mereka telah mendeteksi banyaknya perkebunan Kokain illegal di Kolombia dan berusaha untuk menangkap orang-orang yang memiliki perkebunan tsb serta berupaya untuk menangkap seluruh pengedar kokain yang ada. Namun demikian, hal tersebut mendapatkan banyak tantangan, mengingat bisnis narkoba ini menjadi bisnis yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak dan lintas negara. Semakin jauh narkoba itu bisa menjangkau negara, semakin mahal pula harganya. - Dalam operasi pemberantasan narkoba ini tidak jarang anggota kepolisian ini terbunuh atau cacat. Setidaknya 13 orang terbunuh setiap tahun dan sekitar 70 orang anggota menjadi cacat/kehilangan anggota tubuh, karena kerasnya perlawanan dari gembong narkoba. - Penghasil kokain terbesar adalah Kolombia, Peru dan Venezuela sementara pengguna terbesar adalah Brasil, Kanada dan Amerika Serikat. Ada sekitar 52 organisasi criminal terkait narkoba ini. - Dalam melakukan control peredaran narkoba ini, tidak hanya di terminal airport, namun juga di terminal laut.

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kolombia siap untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam penanggulangan narkoba. <p>Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan, dibahas beberapa ahl terkait dengan penanganan pandemi covid, vaksinasi di Kolombia, penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat Kolombia dan sebagainya .</p> <p>Pihak Kolombia tertarik untuk mengetahui strategi dan mitigasi Indonesia dalam penanganan Covid, karena dianggap Indonesia cukup berhasil dalam mengendalikan penyebaran Covid, termasuk dengan strategi PPKMnya.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut juga dibahas strategi kedua negara dalam pemberian vaksinasi kepada seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun di Kolombia</p> <p>6. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri transportasi, dibahas beberapa hal terkait transportasi diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia mengapresiasi Kolombia yang telah menyediakan jalur sepeda yang cukup banyak tersebar di Kolombia, terutama di Bogota. Transportasi masal di Kolombia juga sudah baik, namun demikian, karena jalur jalanan yang sempit dan seperti pegunungan, kemacetan di jam-jam sibuk tidak dapat dihindari. - Delegasi memberikan pengalaman di Indonesia, terutam di Jakarta dengan adanya transportasi massal seperti MRT yang mungkin bisa dicontoh Kolombia. - Pihak Kolombia terbuka dan sangat tertarik untuk menjalin Kerjasama di sektor transportasi, baik darat maupun air (antar pulau) dan pengembangan infrastruktur - Kedua pihak sepakat pentingnya pembangunan sektor transportasi, terutama di masa pandemi, karena pemerintah harus bisa memastikan bahwa masyarakat tetap terlayani di masa pandemi ini.

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Pemerintah Kolombia akan menyelenggarakan Kongres Bisnis Transportasi pada Bulan Desember 2021 dan mengundang Indonesia untuk dapat berpartisipasi dlm acara tsb</p>
4.	BKSAP - KSR	<p>28 - 29 September 2021 – BKSAP SDGs Day “Peran Strategis Diplomasi Parlemen Dalam Percepatan SDGs dan Pemulihan Ekonomi Berbasis Keunggulan Daerah”</p> <p>Putu Supadma Rudana (FPD), Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, memimpin Delegasi untuk kegiatan BKSAP Day bertemakan “Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Percepatan Pencapaian SDGs dan Pemulihan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah” di Gianyar pada Senin (27/9/2021). Anggota delegasi lainnya yaitu Gilang Dhielafararez (FPDIP); Arzeti Bilbina (FPKB); Muslim (FPD); Husaini bin Zubair (FPD) dan Ema Umiyyatul Chusnah (FPPP).</p> <p>Diskusi interaktif melibatkan Bupati Gianyar dan Wakil Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Gianyar, juga Ketua DPRD, serta Tokoh Masyarakat, tokoh Seni Budaya, dan civitas akademika. Kabupaten Gianyar terkenal hingga ke manca negara sebagai pusat seni budaya, cukup terdampak oleh Covid-19. Pembatasan sosial akibat pandemi membuat para seniman handal Gianyar kehilangan ruang usaha dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Pemkab Gianyar sangat berharap pintu pariwisata dapat segera dibuka kembali.</p> <p>Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gianyar sangat kental dengan nilai gotong royong dan toleransi antar umat beragamanya. 3 (tiga) hal utama yang menjadi inti dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu prosperity, people, planet, telah diimplementasikan dengan kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Gianyar maupun pemerintahan.</p> <p>Kabupaten Gianyar karenanya memiliki unggulan dan potensi besar untuk dipromosikan kembali di dunia internasional, khususnya melalui diplomasi parlemen.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
5.	BKSAP - KSI	<p>28 – 30 September 2021, the First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs</p> <p>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan the First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs pada 28 – 30 September, secara virtual di Jakarta. Konferensi yang bertujuan untuk mendiseminasi ide dan praktik cerdas terkait pencapaian agenda 2030 tersebut dihadiri oleh berbagai delegasi parlemen dari seluruh dunia, dan mengundang pakar-pakar yang memiliki kompetensi di dalam hal tersebut. Konferensi ini mengangkat tema “Turning the challenges of the COVID-19 pandemic into opportunities for parliaments to achieve the SDGs” dan dibagi menjadi 7 sesi.</p> <p>Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani membuka konferensi ini dan menekankan pentingnya rencana aksi global untuk mengakhiri pandemi Covid-19, dan sekaligus menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan inovasi dalam upaya pencapaian target-target SDGs. Ia menegaskan pentingnya produksi vaksin global, mendorong produksi vaksin di negara-negara berkembang, transfer teknologi, dan menghapuskan diskriminasi terkait vaksin. Hal yang juga penting adalah koordinasi berbagai negara dunia dalam pemulihan ekonomi global.</p> <p>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RO, Sihar Sitorus mengajak seluruh anggota parlemen global menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali komitmen dan upaya pencapaian SDGs. Peran parlemen yang kuat terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan penting dalam memastikan pemerintah memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut.</p> <p>Para pakar global yang hadir secara virtual dalam konferensi tersebut antara lain: Fernand de Varennes (United Nations Special Rapporteur on minority issues), Tedros Adhanom Ghebreyesus (Direktur Jenderal World Health Organization), Maisa Rojas (Director of the Center for Climate and Resilience Research Chile dan Lead Author of the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), Charles Chauvel (Global</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Lead, Inclusive Processes and Institutions, UNDP), serta Andrew Raine (Head of International Environmental Law Unit, United Nations Environment Programme).
6.	BKSAP – KSI	<p>29 September 2021, World Trade Organization (WTO) Public Forum</p> <p>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Dr. Fadli Zon diundang menjadi salah satu pembicara kunci dalam diskusi yang bertema Strengthen the multilateral trading system through the equitable governance of work. Ketua BKSAP hadir secara virtual dan menyampaikan pandangannya terkait isu perdagangan dunia.</p> <p>Dalam diskusi tersebut juga hadir Mr. Nadir Manzoor, Co-Chair of the Steering Committee of the PCWTO, Mr. Bernard Lange, Co-Chair of the Steering Committee of the PCWTO, Ms. Marie-Pierre Vedrenne, anggota Parlemen Eropa, Ms. Marva Corley – Coulibaly Chief of the Globalization, International Labour Union (ILO).</p>
7.	BKSAP – KSB	<p>1 - 7 Oktober 2021 Kunjungan Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI ke Rumania</p> <p>Delegasi BKSAP DPRRI dipimpin oleh Putu Supadma Rudana (F-PD) mengadakan pertemuan dengan Dubes RI di Rumania H.E Mr. Amhar Azeth (2/10/2021). Pertemuan itu merupakan agenda pembuka dari rangkaian kunjungan BKSAP ke Rumania. Delegasi berangkatkan Ketua BKSAP DPRRI Dr. Fadli Zon (F- P Gerindra), Wakil Ketua BKSAP DPRRI Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Singgih Januratmoko (F-PG), Fadhlullah, (F-P Gerindra), Ratih Megasari Singkarru (D P Nasdem), Syaikul Islam (F PKB) dan Linda Megawati (F-PD).</p> <p>Pada kesempatan itu, Dubes RI untuk Rumania menjelaskan berbagai potensi kerjasama RI dengan Rumania di bidang perdagangan, pertanian, pariwisata, Pendidikan, ketenagakerjaan, pemanfaatan teknologi dan bidang lainnya. Selain itu dibahas peluang</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>menjadikan Rumania sebagai pintu masuk komoditas ekspor Indonesia dan sebaliknya Indonesia harus siap sebagai pintu masuk komoditas produk Rumania.</p> <p>Hubungan diplomatik Indonesia Rumania sudah terjalin sejak tahun 1950 dan sangat potensial untuk dikembangkan. Dubes menyampaikan apresiasinya dan sambutan positif DPR RI untuk memperkuat hubungan bilateral RI-Rumania.</p> <p>Agenda penting delegasi salah satunya adalah pertemuan dengan parlemen Rumania (Camera Deputatilor). Delegasi diterima oleh Presiden Komisi Luar Negeri Parlemen Rumania, Biro Rozalia-Ibolya dan didampingi oleh Wakil Presiden Komisi Luar Negeri Ben-Oni Ardelean, serta beberapa anggota lainnya.</p> <p>Ketua Delegasi Putu Supadma Rudana menyampaikan keinginan DPR RI untuk mendorong kerja sama kedua negara di semua sektor kehidupan melalui mekanisme government to government, parliament to parliament, business to business, people to people.</p> <p>Sebaliknya Presiden Komisi Luar Negeri Parlemen Rumania sangat berminat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang mulai dari perdagangan, ekonomi, penegakan HAM dan kerja sama lainnya. Sedangkan Biro Rozalia-Ibolya meminta dukungan Indonesia atas pencalonan Rumania sebagai anggota Dewan HAM. Dibahas pula tentang rencana percepatan pencapaian SDGs di Indonesia dan Rumania.</p> <p>Delegasi DPR RI juga mengunjungi kantor walikota Constata dan diterima oleh Wali Kota Vergil Chitac. Constata dipilih sebagai tujuan kunjungan delegasi karena merupakan kota pelabuhan utama Rumania dan kedua terbesar di Eropa setelah Rotterdam. Delegasi DPR menyampaikan harapannya agar Constata dapat menjadi pintu masuk bagi komoditas asal Indonesia ke pasar Eropa. Selain itu dibahas juga kerjasama melalui sister city, sister regency dan sister port.</p> <p>Dalam Kunjungan ke Vineyard Panciu Focsani, dibahas rencana peningkatan kerjasama terutama dalam kerangka B2B mengingat Rumania memiliki potensi yang begitu besar sebagai pintu masuk komoditas ekspor Indonesia ke Eropa.</p>

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
8.	BKSAP - KSB	<p>5 Oktober 2021 – Courtesy Call GKSB DPR RI – Parlemen Brazil dengan Dubes Brazil</p> <p>Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Brazil (Chamber of Deputies), Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.PA mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Republik Federasi Brazil untuk Indonesia Jose Amir da costa Dornelies, pada selasa, 5 Oktober 2021 di Jakarta. Keduanya membicarakan kesamaan kedua negara yang dapat dijadikan modal peningkatan hubungan bilateral dan kerjasama diberbagai bidang.</p> <p>Disebutkan bahwa kedua negara merupakan negara dengan ragam etnik, budaya, dan Bahasa serta kekayaan flora dan fauna yang sangat penting bagi dunia. Ditegaskan pula ihwal urgensi menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan proteksi lingkungan hidup.</p> <p>Pada sisi lain, Luluk yang juga politisi perempuan PKB tersebut menyinggung pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik. Ia juga meminta Brazil ikut mendukung kemajuan sepak bola di Indonesia.</p> <p>Terkait sengketa WTO antara kedua negara, kedua belah pihak sangat memahami kepentingan negara masing masing. Namun demikian, keduanya melihat bahwa persahabatan kedua negara adalah jauh lebih penting.</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	Badan Anggaran DPR RI	<p>A. Raker Banggar DPR-RI dengan Pemerintah dan BI dalam Pembahasan RUU tentang APBN TA 2022</p> <p>Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah menyepakati hasil pembahasan empat panja. (A) Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan. (B) Panja Belanja Pusat dan (C) Panja Belanja Daerah serta (D) Panja RUU APBN 2022.</p> <p>1. Panja A (Asumsi Ekonomi Makro, Pendapatan dan Defisit dan Pembiayaan)</p> <p>A. Indikator asumsi ekonomi makro APBN 2022.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.b) Inflasi 3 persen.c) Nilai Tukar Rupiah Rp 14.350 per 1 USD.d) Suku Bunga SUN 10 Tahun 6,8 persen.e) Harga minyak mentah Indonesia 63 USD/barel.f) Lifting minyak bumi 703 ribu barel/harig) Lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak/hari. <p>B. Sasaran dan Indikator Pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tingkat kemiskinan 8,5-9,0 persen.b) Tingkat pengangguran 5,5-6,3 persen.c) Ketimpangan (rasio gini) 0.376-0,378.d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,41-73,46.e) Nilai Tukar Petani (NTP) 103-106 danf) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106.

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>C. Pendapatan Negara sebesar Rp1.846,13 triliun yang terdiri dari:</p> <p>a) Pendapatan Dalam Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun yang bersumber dari PPh sebesar Rp680,88 triliun, PPn sebesar Rp554,38 triliun, PBB sebesar Rp18,36 triliun, Cukai sebesar Rp203,92 triliun, Pajak Lainnya sebesar Rp11,38 triliun; 2) Pendapatan Perpajakan Perdagangan Internasional Rp41,08 triliun; 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp335,55 triliun, yang bersumber dari Penerimaan SDA Migas sebesar Rp85,9 triliun, dan Penerimaan SDA Non Migas sebesar Rp36,05 triliun, Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp37 triliun, PNBP Lainnya sebesar 97, 81 triliun, dan Pendapatan BLU sebesar 78,80 triliun <p>b) Penerimaan hibah Rp579,9 miliar.</p> <p>D. Defisit dan Pembiayaan mencapai Rp, 868,02 triliun (4,85% PDB).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan utang sebesar Rp 973,58 triliun, yang terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> 1) SBN netto sebesar Rp991,28 triliun. 2) Pinjaman Netto sebesar negatif Rp17,70 triliun; 2. Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp182,31 triliun; 3. Pemberian Pinjaman sebesar Rp585,5 miliar; 4. Kewajiban Penjaminan sebesar negatif Rp1,13 triliun; 5. Pembiayaan Lainnya (SAL) sebesar Rp77,30 triliun. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan mencapai 5,2 persen, cukup realistis jika melihat perkembangan ekonomi saat ini. Kita sudah memiliki modal yang baik pada Triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,2 persen (yoy). Walaupun akan kembali tersendat pada Triwulan III-2021, kita optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan mencapai kisaran 3,7- 4,5 persen (yoy).

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begitupula dengan inflasi, dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, diharapkan akan memberikan dampak terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat kembali normal, sehingga akan mendorong tingkat inflasi lebih tinggi. Kami memperkirakan tingkat inflasi pada tahun 2022, berkisar pada angka 3 persen (yoy). Komposisi ini menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ideal sesuai dengan situasi pada masa normal, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. ▪ Adapun perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya USD berjalan relatif stabil sepanjang tahun 2021. Kita mengusulkan nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar Rp14.350. Besaran nilai tukar tersebut sudah memasukkan faktor kebijakan <i>Tapering off The Fed</i> pada tahun 2021. Kita yakin dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang terpadu antara Bank Indonesia dan Pemerintah, akan mampu memitigasi dampak guncangan akibat kebijakan The Fed, sejak awal. Sehingga tekanan terhadap rupiah tidak akan berdampak signifikan. ▪ Sedangkan pengelolaan suku bunga SUN 10 tahun juga menunjukkan tren positif seiring dengan menguatnya permintaan domestik khususnya dari perbankan, sehingga menyebabkan turunnya kepemilikan asing. Kita yakin, melihat tingginya permintaan domestik, maka suku bunga SUN 10 tahun realistis berada pada angka 6,8 persen dan Kepemilikan domestik bisa tetap dipertahakan. ▪ Membaiknya permintaan terhadap minyak mentah dunia, ikut memberikan dampak terhadap harga minyak mentah Indonesia (ICP). Melihat perkembangan ICP pada bulan Agustus 2021 mencapai 67,80 USD/barel. Diperkirakan hingga akhir tahun 2021 ICP berada pada kisaran 55-65 USD/barel. Sehingga cukup realistis, jika ICP pada tahun 2022 berada di level 63 USD/barel. ▪ Membaiknya harga minyak mentah di pasar Internasional, menjadi momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu, kita mengusulkan pada tahun 2022, lifting minyak bumi sebesar 703 ribu barel/ hari dan lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak/hari.

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. Panja B (Belanja Pusat)</p> <p>A. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,54 triliun, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja K/L sebesar Rp945,75 triliun 2. Belanja non-K/L sebesar Rp998,79 triliun 3. Belanja non-K/L terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Utang Negara sebesar Rp405,87 triliun; b. Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp206,96 triliun; c. Program Pengelolaan Hibah sebesar Rp4.82 triliun; d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp231,13 triliun; e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp150,00 triliun. 4. Anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp542,83 triliun, atau 20,0 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.714,15 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp182,81 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp290,54 triliun. 5. Anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp256,01 triliun, atau 9,4 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.714,15 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp189,08 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp66,93 triliun. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disiplin menjalankan arah kebijakan belanja negara tahun 2022, dengan melakukan penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Agenda ini diarahkan terbentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menopang target pemulihan kesehatan rakyat, ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan program perlindungan sosial, pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, serta mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi. ▪ Penguatan spending better melalui fokus belanja prioritas dan berorientasi hasil (result base), efisiensi belanja non prioritas baik dipusat maupun daerah, dan antisipatif terhadap berbagai faktor yang menjadi sumber ketidakpastian seperti potensi naiknya pandemi Covid-19, bencana

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>alam karena efek la nina yang panjang, geo politik dan keamanan global, serta melakukan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, dan tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyepakati formulasi subsidi listrik dan LPG yang lebih tepat sasaran. Subsidi listrik akan terintegrasi datanya di DTKS, menerapkan kebijakan automatic tariff adjustment untuk pelanggan non-subsidi serta menentukan besaran subsidi untuk setiap rumah tangga penerima subsidi listrik. Terkait subsidi LPG, kita harapkan pemerintah secepatnya mengalihkan mekanisme distribusi LPG subsidi dari penjualan terbuka menjadi semi tertutup. <p>3. Panja C (Belanja Daerah)</p> <p>A. Anggaran TKDD sebesar Rp769,61 triliun yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer ke Daerah sebesar Rp701,61 triliun <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Perimbangan sebesar Rp672,86 triliun <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Transfer Umum sebesar Rp483,26 triliun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana Bagi Hasil sebesar Rp 105,26 triliun, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp378 triliun; 2) Dana Transfer Khusus sebesar Rp 189,59 triliun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp60,87 triliun ▪ Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp128,71 triliun. b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp7 triliun c. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,76 triliun. 2. Dana Desa sebesar Rp68 triliun. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran TKDD diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Kita mendorong agar TKDD lebih efektif dengan mengedepankan transfer berbasis kontrak, langkah bisa meminimalisir dampak <i>idle cash</i> di daerah yang jumlahnya cukup besar. Jika kinerja belanja daerah tidak ada perbaikan yang signifikan, maka harapan dampak pembangunan di daerah yang bisa dirasakan oleh rakyat masih jauh dari harapan. Momentum reformasi fiskal daerah dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, terlebih saat ini sedang pembahasan Rancangan Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) antara Komisi XI DPR dengan pemerintah. Kita

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>harapkan undang undang ini cepat selesai dan menjadi bekal pemerintah daerah memperbaiki fiskalnya, sehingga bisa menjadi instrument pembangunan didaerah yang optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="595 368 2148 628">▪ Mendorong perubahan komposisi belanja untuk pembangunan proporsinya jauh lebih besar daripada anggaran rutin yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah sudah harus mulai melakukan langkah afirmatif agar setidaknya 40 persen dari DAK dan DD dipersiapkan minimal 3 tahun kedepan untuk program ketahanan pangan, khususnya infrastruktur pertanian. Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan ketahanan kebutuhan pangan hewani. Pemerintah daerah bersedia mengalokasikan minimal Rp 1 miliar dari APBD nya khusus untuk program penghijauan didaerahnya masing masing.<li data-bbox="595 628 2148 855">▪ Kebijakan perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum Nasional, harus disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan, baik yang terkait dengan skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus dalam bentuk <i>block grant dan specific grant</i> berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kita berharap kebijakan ini akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh dan Papua secara keseluruhan. <p data-bbox="595 927 1032 959">4. Panja RUU APBN 2022.</p> <p data-bbox="640 963 1682 995">RUU APBN 2022 terdiri dari 49 pasal, penjelasan dan 2 lampiran.</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	Mahkamah Kehormatan Dewan	<ol style="list-style-type: none">1. Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Negara Ukraina, dalam rangka mencari masukan peningkatan kinerja Anggota Parlemen dan Penanganan perkara disiplin serta penerapan Hak Imunitas yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 – 5 Oktober 2021.2. Mahkamah Kehormatan Dewan mengadakan kegiatan Paket Meeting di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat dengan tema Independensi Peran Parlemen sebagai wujud Kedaulatan Rakyat yang turut serta mengundang Rusdi Anwar, S.Pd., M.H. dan Saidiman Ahmad sebagai narasumber.

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Rapat BURT, 21 September 2021 Agenda: Nota Penjelasan Sekjen tentang RKA DPR RI Tahun 2022 Berdasarkan Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran RKA DPR RI Tahun 2022 sebesar Rp5.714.471.327.000,-	
2.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka: 1. Pengawasan pelayanan keprotokolan di Bandara. 2. Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo	---	
3.	Kunjungan Kerja BURT ke Solo dalam rangka Pelayanan Protokol di bandara, 25 - 27 September 2021	---	
4.	Kunjungan Kerja BURT ke Purwakarta dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Jamkestama, 28 - 30 September 2021	---	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
5.	Kunjungan Kerja BURT ke Makassar dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Program Jamkestama, 1 - 3 Oktober 2021	---	
6.	Kunjungan Kerja BURT ke Bali dalam rangka Pelayanan Protokol di bandara, 4 - 6 Oktober 2021	---	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.	Universitas Padjadjaran, tgl 23 s.d. 25 September 2021.	Akuntabilitas Keuangan Negara;	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Padjadjaran dalam rangka memperoleh masukan dari civitas akademisi Universitas Padjadjaran atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja
2.	Rapat Dengar Pendapat tgl. 4 Oktober 2021, Pukul 13.00 dengan BPKP RI.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan BPKP RI untuk memperoleh masukan dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional.	Rapat Dengar Pendapat

LAPORAN DWI MINGGUAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Landas Kontinen	<ul style="list-style-type: none"> • RDPU dengan . Prof. Hasyim Djalal, I Made Andi Arsana,Dr. Kresno Buntoro, Ph.D,Dr.Lur Damos Dumoli Agusman,Arie Afriansyah, SH,MIL.,Ph RDP dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pansus menerima penjelasan dari para pakar mengenai penegakan hukum,penelitian ilmiah,kewajiban amdal dari kegiatan di landas kontinen,hot pursuit dan penyidikan di landas kontinen • Pansus menerima masukan dari BIG terkait penjelasan mengenai perbedaan pengaturan landas kontinen pada UU No.1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen dengan UNCLOS 1982 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Pansus mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan BRIN guna mengembangkan pengetahuan Nasional mengenai SDA di landas kontinen • BIG dan BRIN mendukung perubahan RUU tentang Landas Kontinen terutama penyesuaian dengan UNCLOS 1982 	
2.		<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Kerja ke Universitas Padjajaran Bandung dan Institut Tehnologi Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari masukan mengenai substansi RUU 	
3.	RUU tentang Landas Kontinen	<ul style="list-style-type: none"> • RDP dengan SKK Migas, PT. Pertamina, dan Telkom Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan dan masukan dari SKK Migas, PT.Pertamina dan Telkom Internasional menjadi bahan bagi Pansus dalam 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Set.Pansus, Tim Asistensi dan Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<p>pembahasan RUU dengan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun matrik Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Kunjungan Kerja sebagai bahan penyusunan DIM DPR 	
